

## **BAB II**

### **KEINGINAN TIMOR LESTE UNTUK BERGABUNG MENJADI ANGGOTA ASEAN**

Suatu negara pasti memiliki cerita di masa lalu sebelum terbentuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Hal ini pula yang terjadi pada Timor Leste. Timor Leste atau Republik Demokratik Timor Leste merupakan negara termuda di kawasan Asia Tenggara, negara ini mendapatkan kemerdekaannya atas Indonesia terhitung sejak tahun 2002. Peristiwa-peristiwa yang dilalui masyarakat Timor Leste sebelum berhasil menjadi sebuah negara yang merdeka sedikit banyaknya memiliki andil bagi keadaan negara Timor Leste saat ini. Setelah melewati masa-masa sulitnya, Timor Leste perlahan-lahan bangkit untuk memperbaiki aspek-aspek penting di dalam negaranya. Timor Leste mulai membangun negaranya melalui SDM dan SDA yang ada.

Pada bab II ini akan dijelaskan kondisi negara Timor Leste yang meliputi kondisi geografis, sosial, dan budaya, serta kondisi ekonomi, politik, dan keamanan yang disertai data-data sehingga dapat dengan jelas dipahami. Kemudian juga akan dibahas dan dijelaskan rencana Timor Leste untuk bergabung menjadi anggota ASEAN serta akan dipaparkan dukungan negara-negara anggota ASEAN atas upaya bergabungnya Timor Leste.

#### **A. Kondisi Geografis, Sosial, dan Budaya Timor Leste**

Secara geografis, Timor Leste terletak antara 1230 25' – 1270 19' Bujur Timur dan 80 17' – 100 22' Lintang Selatan. Negara ini berlokasi di hampir separuh wilayah Timur Laut Pulau Timor yang berbatasan dengan Indonesia dan Australia (Harmadi, 2012). Menurut data Bank Dunia pada tahun 2017, jumlah penduduk Timor Leste diperkirakan mencapai 1,2 juta

jiwa (WorldBank T. , 2017). Jumlah penduduk tersebut tersebar di 13 distrik, yaitu Distrik Lautem, Baucau, Viqueque, Manatuto, Manufahi, Ainaro, Dili, Aileu, Ermera, Liquica, Bobonaro, Covalima dan Oecusse (Harmadi, 2012).

Gambar 2.2 Peta Distrik Timor Leste



Sumber: Ariev Rahman. (2014)

Negara ini dulunya pernah dikuasai oleh pemerintah Portugis dan Indonesia. Jika dikaitkan dengan sejarah tersebut, tidak heran mengapa hingga saat ini budaya Portugis masih melekat pada masyarakat Timor Leste secara turun-temurun. Bangunan-bangunan peninggalan Portugis di negara ini menjadi daya tarik tersendiri di bidang pariwisata Timor Leste. Selain dimanfaatkan untuk menarik wisatawan, beberapa dari bangunan tersebut, khususnya yang berada di wilayah Dili, juga dialih fungsikan sebagai kantor-kantor pemerintah. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa sedikit banyaknya budaya Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari keseharian masyarakat di negara ini terlebih masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia (Wahyuni, 2017).

Berdasarkan artikel di website resmi Kementerian Seni dan Budaya Pariwisata Timor Leste, dengan populasi lebih dari 1,2 juta jiwa, orang-orang Timor memiliki hubungan yang terkait erat. Terdapat banyak kelompok adat yang masing-masing memiliki bahasa dan praktik budayanya sendiri. Suku

Tetun adalah kelompok yang terbesar di Timor Leste, orang-orang Tetun berjumlah sekitar 25% dari jumlah populasi yang ada. Mereka tinggal di sekitar Dili, Suai dan Viqueque. Kemudian suku Mambae berjumlah sekitar 10% lebih, mereka sering ditemukan di pegunungan tengah. Kelompok lain termasuk Kemak, Bunak dan Fataluku, antara lain, masing-masing berjumlah 5% atau kurang. Banyak masyarakat Timor Leste yang tertarik ke ibukota untuk mencari pekerjaan, namun 70% dari mereka masih tinggal di daerah pedesaan. Kebanyakan orang Timor ini tinggal di kota-kota kecil dan desa-desa terpencil dan mempraktikkan gaya hidup nelayan dan pertanian subsisten.

Masih berdasarkan artikel yang sama, diketahui bahwa Timor Leste memiliki banyak bahasa lisan yang mencerminkan migrasi masa lalu, kolonialisme, dan pekerjaan lainnya. Bahasa Tetun dan Portugis telah diberi status resmi, di saat yang bersamaan bahasa Indonesia dan Inggris dianggap sebagai bahasa yang juga berfungsi. Selain itu lebih dari 15 bahasa asli lainnya juga digunakan oleh masyarakat Timor Leste. Dari segi agama sekitar 90% orang Timor diidentifikasi sebagai Katolik Roma dan sisanya sebagian besar sebagai Protestan, Muslim dan Hindu. Meskipun demikian, animisme terus menjadi kekuatan persuasif dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan orang di negara ini. Melihat fakta bahwa animisme dan kepercayaan agama dicampur dengan sempurna adalah salah satu aspek yang menarik minat wisatawan untuk berlibur ke Timor Leste.

Dalam aspek kebudayaan, warisan budaya Timor memiliki banyak lapisan (suatu kombinasi yang menarik dari pengaruh tradisional Timor, Portugis, Cina, dan Indonesia). Banyaknya lapisan ini meresap ke arsitektur lokal, masakan, gaya pakaian, dan upaya artistik mereka. Budaya Timor terus berkembang dalam seni dan kerajinan tangan lokal, serta dalam tarian dan musik. Motif budaya, baik tua dan modern, dimasukkan ke dalam desain tais (tekstil tenunan tangan, pekerjaan keranjang dan ukiran kayu). Kelompok budaya

Timor Leste masih menampilkan tarian dan lagu tradisional dan juga menghibur dengan cara baru. Pertunjukan band dan tarian Timor yang berbakat biasanya juga tampil di tempat-tempat lokal dan di festival (Lamont & Jebson, 2015).

## **B. Kondisi Ekonomi Timor Leste**

Sebagai negara yang baru merdeka pada 2002, pemerintah Timor Leste telah memfokuskan tujuannya untuk mempertahankan kesatuan politik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal Ini bukanlah usaha yang mudah mengingat pernah terjadinya tindakan kekerasan, perpindahan penduduk dan perusakan harta benda yang dialami negara ini setelah referendum 1999. Pada saat itu sebagian besar infrastruktur di negara ini hancur, termasuk listrik, air, sistem pembuangan limbah, jalan, sekolah dan fasilitas medis serta properti sektor publik dan swasta. Meskipun kemajuan terus diusahakan, hingga saat ini lebih dari 40% populasi diperkirakan masih hidup di bawah garis kemiskinan dan angka penganggurana masih terhitung tinggi (Lamont & Jebson, 2015).

Selain pertumbuhan di sektor publik, peningkatan jumlah usaha kecil, terutama dalam konstruksi dan penjualan barang grosir dan eceran, juga sedang dibentuk. Sebagian besar perusahaan bisnis sektor swasta ini terkonsentrasi di Dili, yang sejak kemerdekaan telah berubah secara perlahan dengan pembangunan gedung dan peningkatan infrastruktur lainnya. Seperti di sebagian besar ibu kota negara di dunia, Dili menawarkan berbagai macam pusat perbelanjaan, akomodasi, restoran, dan layanan lainnya. Sebaliknya, perubahan kota-kota dan desa-desa tradisional di kabupaten sekitarnya masih kurang terlihat, kecuali peningkatan jalan dan pengembangan listrik. Orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan rata-rata terlibat dalam penangkapan ikan skala kecil, kehutanan dan pertanian (East Timor Economy, 2015).

Sebagian besar perekonomian Timor Leste bergantung pada ekstraksi cadangan minyak dari Laut Timor yang merupakan 80% dari PDB. Dana ini telah memungkinkan investasi yang signifikan dalam layanan inti dan infrastruktur, terutama yang terkait dengan jalan dan listrik. Selain dari pendapatan minyak dan gas, ekspor kopi dan penerimaan wisata bersih merupakan sumber devisa utama Timor Leste lainnya. Namun sektor ini hanya menyumbang sebagian kecil untuk pembayaran impor dan layanan negara (Lamont & Jebson, 2015).

Bersama dengan beberapa sektor lain, pemerintah Timor Leste melihat bahwa pertumbuhan pariwisata merupakan hal yang penting untuk pembangunan ekonomi di masa depan. Di bidang pariwisata, Timor Leste berusaha menjadikan potensi alamnya sebagai pemasok pendapatan negara. Negara ini memiliki beberapa wisata alam yang cukup menarik minat para turis untuk berkunjung. Tempat-tempat tersebut antara lain ialah Pantai One Dolar, lalu ada juga Pantai Cristo Rei yang di lokasinya terdapat patung Tuhan Yesus yang dikenal dengan nama Kristus Raja atau Cristo Rei. Kemudian ada Gunung Ramelau salah satu gunung terkenal di Timor Leste serta Pulau Atauro yang dijadikan destinasi pariwisata (Wahyuni, 2017). Kemudian peningkatan produksi dari pertanian dan perikanan juga dipandang sangat penting, terutama dari sudut pandang ketahanan pangan dan sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan impor terhadap negara lain (Lamont & Jebson, 2015).

Data dari Bank Dunia yang dipublikasi pada bulan Maret 2018 menunjukkan bahwa pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Timor Leste diperkirakan telah turun tajam pada tahun 2017 menjadi proyeksi -1,8 persen dari 5,3 persen pada tahun sebelumnya. Dalam jangka waktu sejak September 2017 hingga Maret 2018, kebuntuan politik pun semakin memburuk, Presiden Timor Leste Francisco Guterres mendeklarasikan "krisis institusional yang serius" dan membubarkan parlemen pada Januari 2018. Pemerintah belum

dapat melewati anggaran rektifikasi untuk 2017 atau anggaran untuk 2018. Anggaran ketat yang dihasilkan telah menyebabkan pengurangan tajam dalam pengeluaran pemerintah sekitar 24 persen tahun-ke-tahun, terutama dirasakan dalam Januari hingga Maret 2018 (Timor-Leste Economic Report, 2018).

Dengan pengeluaran pemerintah mencapai sekitar 75 persen dari PDB, melemahnya pengeluaran berdampak signifikan terhadap pertumbuhan pada 2017. Produksi minyak lepas pantai juga terus menurun secara bertahap selama 2017 karena ladang yang ada terus berkurang, sementara ekspor kopi lebih rendah pada 2017 karena kondisi cuaca yang buruk. Kedatangan turis mancanegara melalui jalur udara terus meningkat, menunjukkan bahwa pasar pengunjung internasional telah bertahan. Di samping itu, konsumsi swasta lebih kuat pada 2017, tetapi investasi (baik publik maupun swasta) telah menurun dan investasi asing langsung (FDI) telah mengering (Timor-Leste Economic Report, 2018).

Dengan diumumkannya pemilihan umum baru dan ketidakpastian politik yang sedang berlangsung, paruh pertama tahun 2018 diharapkan untuk melihat kelanjutan dari lingkungan operasi pemerintah yang terbatas, dan dalam enam bulan ke depan, ada risiko pemotongan pemerintah yang lebih dalam kecuali jika undang-undang anggaran dapat disahkan atau pembiayaan anggaran diidentifikasi.

Setelah pemilihan parlemen pada pertengahan 2018, pemerintah baru diperkirakan akan dibentuk, yang akan memiliki jumlah di parlemen untuk meloloskan undang-undang penting dan operasi pemerintah diharapkan akan meningkat lagi dimulai pada paruh kedua 2018, dan investasi swasta pun dapat meningkat kembali. Tanpa perhatian serius, anggaran pemerintah akan tetap sangat defisit, dibiayai oleh likuidasi aset Dana Minyak meningkatkan kemungkinan tebing fiskal yang merusak ketika sumber daya habis (WorldBank, 2018).

Berikut ini akan dijabarkan topik fokus terkait jalan baru menuju ekonomi baru dan mata pencaharian berkelanjutan di Timor Leste menurut laporan Bank Dunia pada Maret 2018:

- a. Masih ada agenda pembangunan jangka panjang yang mendesak di Timor Leste di mana program pemerintah baru dapat fokus dengan tujuannya. Bidang-bidang reformasi ialah prioritas utama, termasuk mengatasi tantangan multi-sektoral dari malnutrisi yang cukup parah, meningkatkan sistem pemberian layanan publik, mendukung perluasan dan diversifikasi ekonomi, dan mengembalikan manajemen lingkungan dan fiskal pada jalur yang berkelanjutan
- b. Cadangan fiskal yang ada memberikan peluang emas untuk mencapai reformasi ini, tetapi hanya jika digunakan untuk mendukung transisi ke model ekonomi dan fiskal berkelanjutan jangka panjang (Timor-Leste Economic Report, 2018).

Menurut Guteriano Neves, seorang analis kebijakan yang berbasis di Dili, Timor Leste perlu bekerja pada kerangka institusionalnya untuk mendukung pembangunan jangka panjang. Berbagai organisasi, undang-undang dan peraturan, dan kerangka kerja kebijakan, baik secara formal maupun informal memandu perilaku para pelaku dengan menciptakan insentif ekonomi. Peran berbagai lembaga sangat penting, termasuk parlemen, kehakiman, kantor ombudsman, dan komisi anti korupsi. Pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme kontrol internal untuk memperkuat akuntabilitas dan penggunaan sumber daya yang ada secara efisien. Mekanisme pengawasan ekstra-parlementer, seperti jurnalisme investigatif, suara-suara kritis dari LSM dan akademisi, dan ruang untuk partisipasi publik, akan berkontribusi di sini (Neves, 2018).

Selanjutnya masih menurut Neves, untuk mencapai keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, pemerintah perlu bersikap realistis, pragmatis, dan strategis dalam memilih instrumen dan menetapkan target. Proporsi

konsumsi domestik yang signifikan adalah konsumsi publik. Intervensi pemerintah dapat fokus pada konsumsi publik yang tidak perlu, di mana pemotongan belanja dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran publik (Neves, 2018).

### **C. Kondisi Politik Timor Leste**

Sistem pemerintahan di Timor Leste ialah Republik Semi-Presidensial dengan seorang presiden sebagai kepala negara dan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun. Presiden menjamin penghormatan terhadap Konstitusi dan Lembaga Negara, dan bila perlu, dapat bertindak sebagai mediator untuk penyelesaian yang kekacauan. Presiden juga dapat menggunakan hak untuk memveto undang-undang yang diajukan oleh pemerintah dan disetujui oleh Parlemen Nasional. Setelah pemilihan legislatif, presiden menunjuk sebagai perdana menteri pemimpin partai mayoritas atau koalisi mayoritas. Sebagai Kepala Negara, Presiden juga memimpin Dewan Negara dan Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan. Parlemen unikameral Timor adalah Parlemen Nasional atau Parlamento Nacional, yang anggotanya juga dipilih melalui pemungutan suara rakyat untuk masa jabatan lima tahun. Jumlah kursi dapat bervariasi dari minimum 52 hingga maksimum 65. Semua partai politik hukum dapat mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif, mengorganisir untuk itu mempengaruhi daftar calon mereka ke Parlemen Nasional. Pemerintah adalah badan eksekutif negara dan bertanggung jawab untuk pengembangan dan implementasi program pemerintah untuk jangka waktu lima tahun (Political System of Timor Leste).

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Damien Kingsbury di *East Asia Forum*, pemilihan parlemen 2017 memberi harapan bagi masyarakat Timor Leste. Harapan tersebut ialah harapan umum bahwa dua partai besar, CNRT dan Fretilin, akan terus mendominasi politik di negara kecil ini

dan kembali ke koalisi yang mereka miliki sejak 2015. Koalisi tersebut dianggap memberi kestabilan dan janji yang meyakinkan bagi Timor Leste di masa yang akan datang.

Selanjutnya pada 2015, Xanana Gusmao mundur sebagai perdana menteri, kemudian Rui Araujo dari Fretilin menggantikannya dan kemudian menciptakan koalisi baru dengan Fretilin. Hal ini diperkuat dengan dukungan CNRT untuk keberhasilan penawaran Gueterres Francisco 'Lu-Olo' untuk kepresidenan pada bulan Mei 2017. Asumsi yang tersebar luas adalah bahwa, dengan kesepakatan tentang pembagian kekuasaan, Fretilin dan CNRT akan kembali ke koalisi mereka setelah pemilihan; Pemimpin Fretilin Mari Alkatiri juga mengatakan hal yang sama dalam pidato pra-pemilihan.

Pada tahun 2016, masih berdasarkan Kingsbury, musuh politik Fretilin, Partai Demokrat, meninggalkan koalisi, dan sekarang bekerja sama dengan Partai Pembebasan Rakyat yang mengeluarkan Presiden Taur Matan Ruak untuk mendukung kandidat PD, Antonio da Conceicao, untuk pemilihan presiden pada bulan Mei. Kemudian hasil pemilihan umum Mei 2017 menunjukkan bahwa Guterres memenangkan kursi kepresidenan dengan angka 57% di babak pertama. Kemenangan ini merupakan kemenangan yang meyakinkan, tetapi disaat yang bersamaan juga menunjukkan bahwa baik Fretilin atau CNRT telah kehilangan sebagian dari apa yang diharapkan, pada angka 2012, basis pemilih 66,5%. Ternyata CNRT-lah yang sangat menjatuhkan suaranya, dan Fretilin kembali memegang basis dukungannya yang tangguh.

Hasil dari pemilihan umum Mei 2017 juga menunjukkan Fretilin memenangkan pluralitas dalam pemilihan, dengan 29,7% suara, 0,2% di depan CNRT yang kehilangan 7% suara. Fretilin mengambil 23 kursi di parlemen dari 65 kursi, sedangkan CNRT mengambil 22 kursi, CNRT kehilangan delapan kursi dibandingkan dengan kursi mereka sebelumnya. Fretilin tampaknya mendapat dukungan dari KHUNTO partai 'pemuda' yang sedang naik daun, tetapi

mereka juga akan meminta Partai Pembebasan Rakyat (PLP) atau Partai Demokrat (PD) untuk bergabung dengannya untuk membentuk mayoritas parlemen.

Setelah mendukung seorang anggota Fretilin sebagai perdana menteri dan seorang kandidat Fretilin sebagai presiden, ada kekhawatiran di antara anggota CNRT bahwa partai tersebut kehilangan posisi kepemimpinan, berdasarkan posisi dominan 2012. Harapannya adalah bahwa, setelah pemilihan umum 2017, CNRT akan diangkat kembali ke posisi kepemimpinan. Dengan hasil pemungutan suara yang menunjukkan CNRT berada tepat di bawah Fretilin, tampak bahwa segala kesepakatan pada prinsipnya yang telah dicapai antara Gusmao dan Alkatiri dibatalkan. Hampir dua minggu setelah pemilihan, tanpa ada pernyataan koalisi baru yang dibentuk antara Fretilin dan CNRT, Xanana Gusmao mengundurkan diri sebagai kepala CNRT dan mengatakan partai itu harus pergi ke oposisi. Apa pun kesepakatan yang menurut Gusmao dia miliki dengan Alkatiri itu dapat dipastikan batal.

Fretilin akan diminta oleh Presiden Guterres untuk membentuk pemerintahan. Fretilin juga akan meminta partai KHUNTO yang sedang naik daun, untuk bergabung dalam koalisi, memberikan total 28 kursi di parlemen dari 65 kursi yang ada, diikuti dengan 22 kursi diduduki oleh CNRT kemudian delapan kursi diduduki PLP dan tujuh kursi diduduki oleh PD.

Di bawah konstitusi Timor Leste, jika partai dengan suara terbanyak tidak memiliki mayoritas kursi di parlemen, presiden dapat menunjuk partai dengan pluralitas (minoritas terbesar) sebagai pemerintah. Hal ini diperdebatkan oleh Fretilin pada 2007 ketika ia memiliki pluralitas tetapi bukan mayoritas, dan ketika itu Presiden Jose Ramos-Horta akhirnya menunjuk Xanana Gusmao sebagai perdana menteri sebagai kepala pemerintahan koalisi mayoritas. Keputusan itu memicu kekerasan di jalanan Dili, dan di tempat lain. Divisi itulah yang

ingin diselesaikan Gusmao ketika dia membawa Fretilin ke pemerintahan pada 2015.

Jika Fretilin memutuskan untuk membentuk pemerintahan minoritas, mengingat apa yang tampaknya merupakan kesepakatan yang rusak antara Alkatiri dan Gusmao, pemerintah minoritas Fretilin mungkin tidak menerima dukungan mayoritas untuk anggaran Timor Leste berikutnya. Jika anggaran ditolak dua kali, presiden diharuskan untuk mengadakan pemilihan baru. Anggaran pemerintah berikutnya harus mengatasi pengeluaran anggaran negara jauh melebihi pendapatan berkelanjutan.

Keputusan-keputusan terkait anggaran tersebut bisa saja tidak disukai oleh orang Timor Leste biasa yang belum memahami negara mereka. Pada Agustus 2017, pengeluaran diperkirakan akan bangkrut dalam satu dekade ke depan. Di sisi lain pengeluaran yang melebihi pendapatan berkelanjutan selalu menjadi kebijakan Xanana Gusmao. Inilah mengapa CNRT akan memiliki alasan yang sah secara politis, jika tidak berkelanjutan secara ekonomi, untuk menentang anggaran Fretilin.

Kemudian, dengan asumsi bahwa Presiden Guterres meminta Fretilin untuk membentuk pemerintahan, dan prosesnya gagal, ia kemudian akan meminta pemimpin partai besar berikutnya setelah Fretilin - siapa pun yang memimpin CNRT (dan mungkin juga Gusmao) - untuk mencoba membentuk pemerintahan. Gusmao mengatakan bahwa CNRT seharusnya tidak membentuk koalisi baru, meskipun ia mungkin bisa melakukannya dengan PLP, PD, dan KHUNTO mantan presiden Taur Matan Ruak (yang akan pergi dengan siapa pun yang menawarkan mereka posisi), menciptakan koalisi dengan 42 kursi dari 65 kursi yang ada.

Sementara Gusmao berpendapat bahwa situasi di Timor Leste tidak sama dengan di tahun 2007, setelah kekerasan 2006, penentangannya untuk membentuk koalisi akan menghasilkan jalan buntu. Situasi di Timor Leste, seperti

yang dikatakan Gusmao, berbeda sekarang dari pada 2007. Tapi prospek Timor Leste akan pemerintahan yang stabil mulai surut. Fretilin mungkin dapat membentuk pemerintahan minoritas dan menerima dukungan yang cukup di parlemen untuk meloloskan tagihan-tagihan utama. Namun hal ini sepertinya sulit untuk terwujud.

Menurut Damien Kingsbury, Ketua Pribadi dan Profesor Politik Internasional di Universitas Deakin dan Koordinator Misi Pemantau Pemilu Timor Leste Australia, permainan politik Timor Leste masih berubah-ubah dan mungkin berbulan-bulan sebelum jelas bagaimana hasilnya. Tetapi pada tahap ini tampaknya persatuan politik Timor Leste yang banyak dibanggakan kini telah berakhir (Kingsbury, 2017).

#### **D. Kondisi Keamanan Timor Leste**

Pada Oktober 2012, pasukan PBB telah ditarik dari kawasan Timor Leste bertepatan dengan berakhirnya misi perdamaian di negara ini. Sejak saat itu pasukan keamanan Timor Leste pun mengambil alih tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan hukum di negaranya sendiri. Sebelumnya telah diketahui bahwa PBB memiliki peran yang cukup besar dalam peristiwa kemerdekaan Timor Leste yang mana kemerdekaan tersebut didapatkan melalui referendum 1999, hasil referendum ini mengakhiri 24 tahun kependudukan Indonesia di Timor Leste. PBB juga sempat menjadi pemerintah sementara di Timor Leste hingga 2002 sebelum negara ini secara resmi menjadi sebuah negara yang berdaulat. Selain pasukan PBB, Pasukan Stabilisasi Internasional pimpinan Australia, ISF, juga pernah dikerahkan pada tahun 2006 ditengah-tengah kekerasan yang memaksa ribuan orang mengungsi. Kemudian pada November 2012 ISF mengakhiri misinya di Timor Leste (BBC, Timor Leste Pasca Kepergian PBB, 2012).

Paska berakhirnya misi PBB di Timor Leste ada sejumlah tantangan yang dihadapi negara itu, dari sisi keamanan salah satunya adalah soal perdagangan obat bius dan pencucian uang. Fransisco Guterres, selaku Menteri Keamanan Negara Timor Leste yang masih menjabat pada 2012 mengatakan bahwa *drug trafficking* adalah masalah yang sangat besar dan mereka khawatir apabila masalah ini semakin tumbuh menjadi skala besar. Namun ia juga memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mengatasi masalah tersebut apabila mereka menjalin kerja sama seperti dengan Indonesia dan juga bergabung menjadi anggota interpol, serta juga menjalin kerja sama yang baik dengan negara lain. Diluar itu Guterres mengatakan tidak ada masalah keamanan berarti yang mengancam stabilitas Timor Leste paska penghentian misi PBB di negara itu. Menurutnya polisi dan militer Timor Leste telah membuktikan kemampuannya dengan keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pengamanan kedatangan sejumlah pemimpin negara tetangga ke daerah tersebut (BBC, Timor Leste Pasca Kepergian PBB, 2012).

### **E. Keinginan Timor Leste untuk Bergabung ke ASEAN**

Di tengah usaha untuk menstabilkan keadaan negaranya, Timor Leste yang merupakan salah satu negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara memiliki keinginan untuk bergabung menjadi anggota ASEAN. Melalui Perdana Menteri Xanana Gusmão, Timor Leste menyampaikan bahwa sebuah negara tidak bisa hidup sendiri dan Timor Leste ini merupakan bagian dari Asia Tenggara. Gusmão juga memastikan bahwa negaranya akan mempersiapkan hal-hal apa saja yang diperlukan untuk bergabung menjadi anggota dari ASEAN. Jika Timor Leste masuk menjadi anggota ASEAN maka masih menurut Gusmão, Timor Leste akan berkontribusi untuk perkembangan dunia (Anggoro, 2013).

Selanjutnya, Gusmão juga memiliki pandangan bahwa apabila Timor Leste masuk menjadi anggota ASEAN, ASEAN dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kestabilan ekonomi

dan politik internal di dalam negaranya. Ia juga memiliki keyakinan bahwa jika negaranya bergabung menjadi anggota ASEAN, Timor Leste berkesempatan untuk mendapat peluang memperluas pasar ekspor (Anggoro, 2013). Pandangan-pandangan inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan Timor Leste mengajukan berkas permohonan keanggotaan ASEAN pada 4 Maret 2011 melalui Zacarias Da Costa selaku Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Timor Leste kala itu.

#### **F. Dukungan Negara-negara Anggota ASEAN terhadap Timor Leste**

Menanggapi keinginan keanggotaan Timor Leste tersebut, negara-negara anggota ASEAN memiliki pendapat yang berbeda. Yang mana ke-9 dari 10 negara anggota ASEAN mendukung bergabungnya Timor Leste. Dukungan ini datang dari Indonesia, Thailand, Malaysia, Kamboja, Vietnam Brunei Darussalam dan Myanmar yang disampaikan oleh Edmund Sim, selaku Penasihat ASEAN bahwa, "Myanmar sangat mendukung Timor Leste. Aung San Suu Kyi dan Ramos-Horta adalah peraih hadiah perdamaian Nobel dan juga teman baik". Bahkan dalam penutupan KTT ASEAN ke 22 Presiden Filipina, Benigno Aquino, mengungkapkan dukungan terhadap keanggotaan Timor Leste dengan mengatakan bahwa "Pada catatan ini, izinkan saya untuk menyatakan dukungan Filipina terhadap upaya Timor Leste untuk bergabung dengan komunitas Asean. Kami berharap dapat bekerja lebih dekat dengan Anda di masa depan dalam memajukan dialog regional, yang kami tahu akan mengurangi tidak hanya pada pertumbuhan orang-orang kami dan negara-negara kami, tetapi juga akan berkontribusi pada stabilitas dan pengembangan berkelanjutan dari wilayah kami". Dukungan terbuka juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang dibuktikan pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang ke-48 di Kuala Lumpur Indonesia membahas tentang keanggotaan Timor Leste di ASEAN yang masih belum terealisasikan dan mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk segera memutuskan

dengan matang seputar kapan Timor Leste dapat bergabung kedalam asosiasi (Prameswari, Penyebab Penolakan Singapura Terhadap Konsensus Keanggotaan Timor Leste di ASEAN, 2017).